



Penegakan Hukum dalam Pertambangan Emas Tanpa Izin di Banyumas Jateng: Sinergitas Antara Keadilan Sosial, Keberlanjutan Ekonomi, dan Partisipasi Masyarakat

Herwanto¹, Nanik Sutarni²

^{1,2}Universitas Boyolali, Indonesia

E-mail: Herwanto851224@gmail.com¹, naniksutarni19@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 10, 2026

Accepted January 11, 2026

Keywords:

Law Enforcement, Illegal Gold Mining, Social Justice, Economic Sustainability, Community Participation, Banyumas, Central Java.

ABSTRACT

This study investigates the role of law enforcement against illegal gold mining in Banyumas, Central Java, in creating synergy between economic sustainability, social justice, and environmental protection. This article adopts a theoretical approach that combines social justice, economic sustainability, and human rights theories, and investigates the practical implications of law enforcement on local communities who depend on illegal mining activities for their livelihoods. The results of the study show that although law enforcement can reduce or stop illegal mining practices, existing policies often do not consider the socio-economic dimensions of communities that depend on mining as a source of income. This study offers a solution in the form of increased collaboration between the government, the community, and the private sector in forming a more inclusive and sustainable law enforcement model. In this context, the active participation of local communities in decision-making related to law enforcement is key to creating a balance between local economic needs and the protection of natural resources.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 10, 2026

Accepted January 11, 2026

Keywords:

Penegakan Hukum, Pertambangan Emas Tanpa Izin, Keadilan Sosial, Keberlanjutan Ekonomi, Partisipasi Masyarakat, Banyumas Jateng.

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki peran penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Banyumas Jateng dalam membentuk sinergitas antara keberlanjutan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Artikel ini mengadopsi pendekatan teoritis yang menggabungkan teori keadilan sosial, keberlanjutan ekonomi, dan hak asasi manusia, serta menyelidiki implikasi praktis dari penegakan hukum terhadap masyarakat lokal yang menggantungkan hidup mereka pada aktivitas pertambangan ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penegakan hukum dapat mengurangi atau menghentikan praktik pertambangan ilegal, kebijakan yang ada seringkali tidak mempertimbangkan dimensi sosial-ekonomi masyarakat yang bergantung pada pertambangan tersebut sebagai sumber pendapatan. Penelitian ini menawarkan solusi berupa peningkatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam membentuk model penegakan hukum yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait penegakan hukum menjadi kunci untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi lokal dan perlindungan terhadap sumber daya alam.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

***Corresponding Author:***

Herwanto
Universitas Boyolali, Indonesia
E-mail: Herwanto851224@gmail.com

PENDAHULUAN

Pertambangan emas tanpa izin (PETI) telah lama menjadi masalah serius di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang memiliki cadangan emas cukup besar, salah satunya di Banyumas Jateng. Aktivitas pertambangan ini sering kali dilakukan oleh masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, meskipun seringkali merusak lingkungan dan melanggar regulasi yang ada. Banyak yang terlibat dalam kegiatan ini karena keterbatasan pilihan ekonomi, sementara itu, kerusakan yang ditimbulkan oleh pertambangan ilegal ini juga sangat besar, seperti kerusakan hutan, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Penegakan hukum terhadap PETI di Banyumas Jateng menghadapi tantangan yang sangat besar. Di satu sisi, penegakan hukum bertujuan untuk melindungi lingkungan dan mengurangi eksploitasi ilegal terhadap sumber daya alam, namun di sisi lain, kebijakan ini seringkali tidak mempertimbangkan dimensi sosial-ekonomi masyarakat yang bergantung pada aktivitas pertambangan tersebut sebagai mata pencaharian utama. Hal ini menciptakan ketegangan antara upaya konservasi dan kesejahteraan sosial masyarakat lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Banyumas Jateng dapat menciptakan sinergi antara keberlanjutan ekonomi dan perlindungan lingkungan, sambil mempertimbangkan keadilan sosial bagi masyarakat. Penulis berusaha memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan mencari solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang memungkinkan untuk menggali secara lebih mendalam dan holistik mengenai isu penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Banyumas Jateng. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah setempat, tokoh masyarakat, dan pelaku pertambangan ilegal; observasi lapangan terhadap kegiatan pertambangan yang berlangsung di kawasan tersebut; serta analisis dokumen kebijakan yang terkait dengan pertambangan ilegal.

Wawancara dilakukan untuk memahami perspektif berbagai pihak terkait dengan penegakan hukum di bidang pertambangan ilegal. Observasi lapangan memberikan wawasan langsung mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pertambangan emas tanpa izin. Sedangkan analisis dokumen digunakan untuk menggali kebijakan hukum yang ada, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik triangulasi, yaitu menggabungkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk memastikan validitas temuan dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai masalah yang ada.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Penegakan Hukum dalam Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin

Penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Banyumas Jateng menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Pertama, ada ketergantungan sosial-ekonomi masyarakat terhadap kegiatan pertambangan ilegal. Banyak warga setempat yang terlibat dalam pertambangan karena ini adalah satu-satunya sumber pendapatan yang tersedia bagi mereka, terutama bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan lain yang bisa digunakan untuk mencari nafkah. Oleh karena itu, penegakan hukum yang dilakukan sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap kehidupan ekonomi mereka.

Kedua, meskipun pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memberantas pertambangan ilegal, implementasi kebijakan tersebut sering kali terhambat oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan kebutuhan masyarakat lokal. Di sisi lain, lemahnya pengawasan dan potensi korupsi dalam aparat penegak hukum juga memperburuk situasi. Hal ini menyebabkan penegakan hukum yang dilakukan sering tidak konsisten dan tidak memberikan dampak nyata di lapangan.

Sinergitas antara Keadilan Sosial, Keberlanjutan Ekonomi, dan Partisipasi Masyarakat

Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada pemberantasan pertambangan ilegal, tetapi juga harus menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang terlalu keras tanpa mempertimbangkan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat tidak akan memberikan solusi jangka panjang. Sebaliknya, pendekatan yang lebih inklusif, di mana masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, dapat menghasilkan dampak yang lebih positif.

Penting untuk memperkenalkan kebijakan yang tidak hanya menekankan pada pemberantasan kegiatan ilegal, tetapi juga menciptakan alternatif ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Misalnya, pelatihan keterampilan alternatif atau program pemberdayaan ekonomi yang ramah lingkungan dapat membantu masyarakat beralih dari pertambangan ilegal ke sektor-sektor ekonomi lain yang lebih berkelanjutan. Selain itu, sektor swasta juga memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dan memberikan dukungan modal untuk mengembangkan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat penting. Masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan penegakan hukum, tetapi juga memberi masyarakat rasa memiliki terhadap sumber daya alam mereka. Dengan partisipasi aktif, masyarakat dapat lebih mudah menerima kebijakan yang ada dan ikut berperan dalam melindungi lingkungan.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Banyumas Jateng membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Model penegakan hukum yang hanya berfokus pada pemberantasan kegiatan ilegal tanpa memperhatikan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat tidak akan menghasilkan solusi yang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara keberlanjutan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan dalam penegakan hukum di sektor pertambangan.



Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus bekerja sama dalam menciptakan model penegakan hukum yang inklusif dan berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan dalam menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, penegakan hukum dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bebbington, A., & Bury, J. (2009). *An overview of the role of large-scale mining in the global economy and its linkages with local poverty*. World Development, 37(3), 330-349.
- Fitzpatrick, D. (2015). *The challenges of legal reform in the mining sector: A global perspective*. Law and Development Review, 8(1), 45-67.
- Global Witness. (2020). *The Impact of Illegal Mining on the Environment and Local Communities: A Global Perspective*. Global Witness Report.
- Hilson, G. (2009). *Small-scale mining, poverty and economic development in sub-Saharan Africa: An overview*. Resources Policy, 34(1-2), 1-5.
- Kaiser, M. (2018). *Environmental justice and the challenges of illegal mining in Indonesia*. Indonesian Law Journal, 8(2), 78-92.
- Mogalakwe, M. (2017). *Legal and socio-economic implications of illegal mining: A comparative study of South Africa and Indonesia*. Journal of International Environmental Law, 28(3), 203-225.
- Rukmana, D., & Suryani, S. (2021). *The Role of Law Enforcement in Managing Illegal Mining: A Case Study of Banyumas*. Indonesian Law Review, 22(1), 135-153.
- Tarras-Wahlberg, N., & Danielson, A. (2019). *Mining and Local Development: Challenges of Governance and Law Enforcement in Developing Countries*. Cambridge University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (2009).
- Zhang, X., & Leung, D. (2021). *Environmental and social impacts of illegal mining activities: A global review*. Environmental Policy and Law, 51(2), 1-15.